

## Intervensi militer dan penerapan kebijakan Orde Baru di Udanawu, Kabupaten Blitar (1969-1983 an)

Muhammad Rifki Amirudin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145,  
muhammad.rifki.2007326@students.um.ac.id

\*<sup>1</sup>Corresponding email: muhammad.rifki.2007326@students.um.ac.id

### **Abstract**

*The Pancasila Village Project is President Soeharto's modernization program in the Blitar area. Therefore, this research aims to narrate the progress of the Pancasila Village project during the New Order era as well as the forms of implementation of President Soeharto's government policies in Udanawu District from 1969 to 1983.. This research was motivated by the emergence of one of the villages in Udanawu District as one of the areas that was successful in implementing the modernization and development program at the beginning of the New Order government. The modernization program that was preceded by the purge of communists is an interesting paradox to study. The method used in this research is a historical research method which includes topic selection, heuristics, criticism, interpretation and historiography using a social history approach carried out with interpretation from archives, newspapers, and articles. This research found that military intervention through Pancasila Village was less visible in the lives of the people of Udanawu. The term Pancasila Village is not well understood by village communities in the Udanawu District area. Even two village officials in the Udanawu District area did not know that Pancasila Village existed. However, between 1969 and 1983 the government succeeded in improving agriculture, controlling population, and building several other supporting infrastructure in the Udanawu District area.*

### **Keywords**

*Pancasila Village; New Order era; Udanawu District*

### **Abstrak**

Projek Desa Pancasila adalah program modernisasi Presiden Soeharto di wilayah Blitar. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menarasikan berjalannya proyek Desa Pancasila pada masa Orde Baru serta bentuk-bentuk penerapan kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto di Kecamatan Udanawu pada tahun 1969 hingga 1983 an. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya salah satu desa di Kecamatan Udanawu sebagai salah satu wilayah yang berhasil dalam pelaksanaan program modernisasi dan pembangunan pada awal pemerintahan Orde Baru. Program modernisasi yang didahului pembersihan orang-orang komunis menjadi paradoks menarik untuk diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial yang dilakukan dengan interpretasi dari arsip, koran, dan artikel. Penelitian ini menemukan fakta bahwa intervensi militer lewat Desa Pancasila kurang tampak dalam kehidupan masyarakat Udanawu. Istilah Desa Pancasila kurang dimengerti keberadaannya oleh masyarakat desa di wilayah Kecamatan Udanawu. Bahkan dua pejabat desa di wilayah Kecamatan Udanawu tidak mengetahui adanya Desa Pancasila.

Meskipun begitu, antara tahun 1969 hingga 1983 pemerintah berhasil melakukan perbaikan pertanian, pengendalian jumlah penduduk, serta membangun beberapa infrastruktur penunjang lainnya di wilayah Kecamatan Udanawu.

### **Kata kunci**

Desa Pancasila; masa Orde Baru; Kecamatan Udanawu

*\*Received: May 12<sup>th</sup>, 2024*

*\*Accepted: July 30<sup>th</sup>, 2024*

*\*Revised: July 10<sup>th</sup>, 2024*

*\*Published: July 31<sup>st</sup>, 2024*

## **PENDAHULUAN**

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 dan Perpres No. 111 Tahun 2022, pemerintah baru saja meluncurkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa yang menyangkut beberapa bidang seperti kesejahteraan, pangan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, serta bidang-bidang kesejahteraan desa lainnya (Pristiandaru, 2023). Hal ini didasarkan atas posisi dan peran desa sebagai indikator serta pendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Apabila permasalahan desa di Indonesia dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan dapat terselesaikan (Iskandar, 2020).

Jika menilik pada sejarah, pada dasarnya program serupa pernah dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini dibuktikan dengan dicanangkannya program Repelita I hingga VI oleh Presiden Soeharto. Pada tahap Repelita pertama hingga ketiga (1969-1984) fokus utama pembangunan pemerintah adalah pertumbuhan GNP dan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Sementara itu, pada Repelita ke empat hingga ke enam (1984-1999) fokus pembangunan pemerintah adalah pada investasi dan infrastruktur di wilayah perkotaan (Syahrie, 2009). Sebagai bentuk komitmen Presiden Soeharto dalam penerapan Program Repelita di wilayah Blitar, pada awal tahun 1969 pemerintah membentuk Desa-desanya Pancasila di seluruh wilayah Blitar. Program tersebut diamanatkan kepada setiap koramil di wilayah Blitar untuk membentuk minimal satu desa Pancasila. Dalam program ini pemerintah melalui militer dan perangkat desa berusaha membentuk desa ideal yang sesuai dengan cita-cita pemerintah Orde Baru. Melalui kuasa yang ada pemerintah Orde Baru berusaha mengatur bentuk rumah, populasi, serta tingkah laku masyarakat desa (Bahan Seminar Desa Pancasila, 1969).

Program desa Pancasila menyangkut pada seluruh kecamatan yang ada di Blitar, seperti Talun, Sanankulon, Udanawu, Wates, Doko, Suruhwadang, Garum, Binangun, Srengat, Ponggok, Kanigoro, Kesamben, Panggungrejo, Sutojayan, Bakung, dan Wlingi (Bahan Seminar Desa Pancasila, 1969). Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Udanawu, Desa Pancasila yang digaungkan oleh pemerintah Orde Baru tidaklah ada. Para perangkat desa yang pernah menjabat kala itu tidak mengetahui adanya Desa Pancasila. Selain itu, militer yang ada juga tidaklah berperan secara aktif melainkan hanya sebagai peninjau disaat momen-momen tertentu (Jawari, 2022 & Sarehudin, 2023).

Kecamatan Udanawu merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Blitar Barat. Di wilayah ini terdapat Desa Bendorejo yang pernah muncul sebagai salah satu desa yang memenangkan ajang perlombaan desa se-Jawa Timur pada tahun 1970-an. Dalam mendukung sukseksi program, pemerintah memang sering menggelar lomba-lomba desa yang diadakan rutin setiap tahunnya. Dalam ajang lomba tersebut pemerintah melihat dari sisi tingkat pembangunan, pangan, dan pengendalian populasi. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai program Desa Pancasila serta implementasi program-program pembangunan Orde Baru melalui studi kasus di Kecamatan Udanawu. Ada beberapa alasan mengenai pemilihan lokasi ini. Pertama, Udanawu merupakan salah satu target operasi anti-komunis di tahun 1965 dan 1968. Operasi ini merupakan serangkaian pembersihan orang-orang komunis dan simpatisannya di wilayah Blitar dalam upaya stabilisasi oleh pemerintah Orde Baru. Keadaan ini berkaitan erat dengan komunisme yang dianggap sebagai akar permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru (Hadi & Kusuma, 2012). Kedua, terdapat upaya golkarisasi yang kuat yang terjadi di tingkat desa di Udanawu. Ketiga, wilayah Blitar adalah salah satu wilayah yang mendapat penghargaan dari pemerintah provinsi Jawa Timur dalam bidang Keluarga Berencana (KB) (Rizki, 2023) serta menjadi objek proyek-proyek modernisasi pemerintah Orde Baru. Proyek modernisasi seperti pengenalan teknologi pertanian, pengelolaan koperasi desa, dan pembangunan infrastruktur publik gencar dilaksanakan pada awal-awal pemerintahan Orde Baru. Ketiga hal ini, operasi anti komunis yang memakan korban, upaya golkarisasi, dan program modernisasi Orde Baru menjadi sebuah paradoks yang menarik. Dapat dikatakan bahwa penyingkiran komunisme menjadi awal proyek pembangunan Orde Baru.

Tulisan sejarah yang membahas mengenai Orde Baru dapat ditemukan dalam beberapa karya yang ditulis oleh Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma (2012) yang membahas mengenai propaganda serta sikap anti komunisme yang dilancarkan Orde Baru dan Abdul Syukur (2010) yang membahas mengenai pemerintahan Orde Baru dari aspek sosial, politik serta ekonomi. Selain itu karya lain seperti Ferdi Gultom dan Sugeng Hariyanto (2021) yang membahas seputar program revolusi hijau yang mengubah kehidupan sosial masyarakat petani serta Muhammad Rifki Amirudin, Athifa Raissa Putri dkk (2022) yang membahas Desa Pancasila, strategi, dan bentuk-bentuk pembangunan pada masa Orde Baru di wilayah Blitar.

Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas mengenai implementasi keterlaksanaan program serta pengalaman sehari-hari warga masyarakat yang menjadi sasaran proyek desa Pancasila dan program modernisasi Orde Baru. Oleh karena itu, melalui pendekatan sejarah sosial, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana berjalannya program desa Pancasila di Udanawu? Bagaimana bentuk-bentuk penerapan kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto di Udanawu?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menyusun hasil penelitian, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2001) dalam metode penelitian sejarah terdapat lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber tekstual, visual, dan sumber lisan. Di antara sumber tekstual yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan seminar desa Pancasila tahun 1969 dan laporan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Blitar tahun 1974 yang diperoleh dari perpustakaan Museum Kodam V Brawijaya Malang. Sebagian sumber primer ini peneliti dapat dari keikutsertaannya dalam penelitian pada tahun 2022 tentang desa Pancasila di wilayah Blitar yang dipimpin oleh Slamet Sujud Purnawan Jati dengan judul *Mereka yang Turut Membangun Negara: Masyarakat Desa dan Desa Pancasila di Jawa Timur Pada Masa Orde Baru (1968-1980)*. Terkait sumber lisan peneliti menggunakan data wawancara dari warga Desa Tunjung dan Bendorejo dan beberapa perangkat desa yang mulai menjabat tahun 1969 dan 1976. Selain itu, peneliti juga menggunakan data foto yang didapatkan dari arsip serta koleksi pribadi narasumber. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap kritik, baik intern maupun ekstern untuk mengetahui keaslian dari sumber yang telah didapatkan. Setelah melalui tahap kritik sumber, data yang telah didapat kemudian diinterpretasi untuk mengetahui maksud, tujuan serta jalannya peristiwa sejarah. Selanjutnya, tahap terakhir dari penelitian ini adalah historiografi, yaitu menulis peristiwa yang ada menjadi tulisan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Desa Pancasila di Udanawu**

Secara administratif, Kecamatan Udanawu merupakan salah satu kecamatan di wilayah Blitar yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kediri di sebelah utara. Pada masa Orde Baru, wilayah ini pernah menjadi target dalam operasi penumpasan orang-orang yang dicurigai dan terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Orang-orang yang dicurigai dan terafiliasi sebagai orang PKI akan diangkut dan dieksekusi secara massal di tempat yang sudah ditentukan. Banyak orang yang secara sukarela menjadi relawan dalam penumpasan orang komunis di wilayah ini. Kebanyakan mereka adalah tokoh agama atau seorang penganut agama yang taat (Jawari, 2022). Perseteruan antara agamawan dan orang-orang komunis terjadi akibat adanya doktrin tujuh setan desa yang dianut oleh orang-orang PKI. Ketujuh setan desa tersebut dianggap oleh orang-orang komunis sebagai pihak yang menghalangi tujuan PKI serta menghambat kemakmuran masyarakat desa. Ketujuh setan desa itu adalah (1) Tuan tanah jahat, yaitu tuan tanah yang menolak ketentuan yang ada dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) dan UUPBH (Undang-undang Pokok Bagi Hasil); (2) Pejabat yang membela tuan tanah; (3) Para pemeran petani; (4) Para birokrat kapitalis yang menyelewengkan kekuasaannya guna memperkaya diri sendiri dengan cara

melakukan eksploitasi kepada kaum petani; (5) Bandit desa yang menjadi kaki tangan dan antek-antek tuan tanah; (6) Para rentenir atau orang yang menganakkan uang, dan; (7) Pengijon atau penghisap darah rakyat yang menjebak kaum tani untuk menjadi penghutang seumur hidup. Dalam hal ini, para kiai dan tokoh agama dianggap oleh orang komunis sebagai tuan tanah jahat. Pasalnya para kiai adalah orang yang kebanyakan memiliki tanah yang luas untuk mengembangkan pondoknya. Maka dari itu, tidak heran jika sering terjadi bentrok dan konflik antara PKI dengan tokoh-tokoh agama (Nugroho & Afiyanto, 2022).

Setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S), pemerintah secara masif menangkap orang-orang yang dianggap terlibat dan berafiliasi dengan PKI. Selain itu, pemerintah juga gencar menebarkan jargon-jargon Pro-Pancasila dan sikap anti-Komunis di seluruh lapisan masyarakat. PKI dan ideologi komunisnya dianggap sebagai dalang dari semua masalah serta tidak cocok diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Hadi & Kusuma, 2012). Maka dari itu, sebagai wujud komitmen Presiden Soeharto dalam meminimalisir paham-paham komunis, pemerintah membuat sebuah prototipe desa ideal yang sesuai dengan harapan pemerintah Orde Baru. Desa tersebut dikenal dengan Desa Pancasila. Proyek Desa Pancasila adalah program modernisasi pemerintahan Presiden Soeharto yang bertujuan untuk membumikan nilai-nilai dalam falsafah Pancasila dan menjadi anti tesis dari paham-paham komunis yang merebak di masyarakat. Pemerintah memandang bahwa nilai-nilai dalam falsafah Pancasila dirasa cocok membawa masyarakat desa ke arah yang lebih baik. Nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai yang mengarah pada religiusitas, memupuk rasa manusiawi, demokratis, persatuan, serta kesejahteraan (Utama & Dewi, 2018).

Desa Pancasila di Blitar mulai dicanangkan pada awal tahun 1969. Proyek ini menyasar pada seluruh wilayah Blitar meliputi kecamatan Talun, Sanankulon, Udanawu, Wates, Doko, Suruhwadang, Garum, Binangun, Srengat, Ponggok, Kanigoro, Kesamben, Panggungrejo, Sutojayan, Bakung, dan Wlingi. Melalui proyek ini, koramil-koramil diseluruh Blitar diberi amanat untuk membuat minimal satu desa Pancasila (Bahan Seminar Desa Pancasila, 1969). Pelibatan TNI kedalam proyek desa Pancasila didasarkan pada pandangan pemerintah Orde Baru bahwa Desa Pancasila adalah wujud bakti TNI kepada masyarakat. Pandangan ini selaras dengan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang memandang bahwa ABRI merupakan bagian dari masyarakat dan harus melebur menjadi satu dengan masyarakat (Syukur, 2010). Meskipun begitu, keberadaan dan istilah Desa Pancasila tampak asing dihadapan para pejabat desa yang pernah menjabat kala itu. Saat masih mengemban jabatan, mereka sebatas tahu bahwa program dan kebijakan yang ada adalah wujud penataran P4 (Jawari, 2022 & Sarehudin, 2023). Hal ini tentu bertolak belakang dengan pelaksanaan program ini yang menggunakan metode *Civic Mission* yang menempatkan pemerintah pusat sebagai fasilitator sedangkan pamong desa dan pemerintah setempat sebagai pelaksana utama (Bahan Seminar Desa Pancasila, 1969).

Proyek desa Pancasila menysasar dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah Blitar. Salah satu aspek yang menjadi sorotan pembenahan pemerintah Orde Baru adalah dalam bidang politik dan keamanan. Secara khusus proyek desa Pancasila berguna untuk 1) memantau pemilu pada saat itu dengan memastikan keberhasilan pemilu Orde Baru, 2) memastikan bentuk kekuasaan Orde Baru, 3) stabilitas nasional, politik, dan ekonomi sebagai landasan untuk pembangunan lebih lanjut, 4) membersihkan masyarakat dari pengaruh Gerakan 30 September dan PKI atau Orde Lama (Amirudin, dkk 2022). Pemerintah Orde Baru berusaha membangun persepsi bahwa PKI dan Orde Lama atau pemerintahan Soekarno adalah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan menghambat pembangunan nasional (Hadi & Kusuma, 2012). Dalam hal ini, pemerintah melakukan pendataan rutin serta wajib lapor di Kecamatan Udanawu. Para perangkat desa diwajibkan memberi laporan terkait perkembangan desa kepada koramil, kecamatan, dan polsek setiap harinya (Jawari, 2022).

Selain dalam bidang politik dan keamanan, pemerintah Orde Baru juga menyoroti bidang sosial dan ekonomi yang ada di daerah Blitar. Melalui proyek desa Pancasila, pemerintah Orde Baru berusaha membentuk desa ideal yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Masyarakat diwajibkan memiliki rumah permanen dilengkapi halaman yang dapat ditanami tanaman-tanaman tertentu serta memiliki sanitasi yang baik. Pemerintah ingin menunjukkan kemodernan melalui proyek-proyek pembangunan yang sedang dijalankan. Dengan mengikuti hal tersebut, masyarakat akan sampai pada tahap modernitas (Bahan Seminar Desa Pancasila, 1969). Pemerintah berusaha menanamkan pada masyarakat jika kemodernan adalah mengikuti perkembangan terhadap sesuatu hal yang baru. Dengan kata lain, taat serta ikut menyukseskan program pembangunan pemerintah Orde Baru merupakan bentuk mendukung kemodernan. Keadaan ini didukung dengan sikap anti-komunis serta operasi-operasi militer yang pernah dilakukan pemerintah yang membuat masyarakat cenderung patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah (Nordholt, 2005). Meskipun tidak dikenal dengan Desa Pancasila, di wilayah Udanawu sendiri pemerintah juga pernah melakukan kebijakan serupa. Para perangkat desa diperintahkan untuk ikut mensosialisasikan pembuatan rumah permanen serta tugu-tugu Brawijaya di setiap perbatasan desa. Selain itu, pemerintah juga rutin mengadakan lomba tahunan serta memberi penghargaan terhadap desa paling sukses dan paling indah (Jawari, 2022).

Selain infrastruktur, proyek Desa Pancasila juga menysasar dalam bidang kependudukan. Pemerintah berusaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang ada di masyarakat. Lambatnya laju pertumbuhan penduduk secara tidak langsung akan mengurangi beban tanggungan negara. Dengan demikian maka secara tidak langsung akan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Didu & Fauzi, 2016). Maka dari itu, untuk menekan angka pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah Orde Baru mencanangkan program Keluarga Berencana

(KB) kepada ibu-ibu usia produktif. Berbeda dengan pemerintahan Presiden Sukarno, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengendalian populasi lewat KB sangat didukung bahkan digencarkan secara massal. Dengan dalih kesejahteraan kehidupan rakyat dan pembangunan negara, pemerintah Orde Baru berusaha menata tubuh dan mengesampingkan hak-hak asasi perempuan. Hak-hak yang dimaksud adalah hak yang secara legal mengakui setiap pasangan untuk secara bebas dan bertanggungjawab menentukan jumlah keturunan, jarak kelahiran, serta mendapatkan informasi dan sarana untuk mewujudkannya (Sihite, 2003). Namun, dalam kenyataannya lewat program safari KB, pemerintah Orde Baru berusaha menekan naiknya angka demografi. Bahkan lewat PKK para akseptor KB dijemput dari rumah ke rumah dan dibawa ke kantor desa untuk dilakukan KB. Bahkan jika terjadi penolakan, para perempuan desa tersebut tidak jarang mendapat kekerasan psikis dan dituduh sebagai PKI (Dewi & Kasuma, 2014).

### **Bentuk-bentuk Penerapan Kebijakan Orde Baru di Kecamatan Udanawu**

Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru gencar melakukan program pembangunan dan modernisasi. Proyek-proyek modernisasi yang dicanangkan merupakan salah satu pilar dari Trilogi Pembangunan yang digagas oleh pemerintah. Isi dari Trilogi Pembangunan diantaranya adalah (1) stabilitas nasional; (2) pemerataan pembangunan; dan (3) pertumbuhan ekonomi. Ketiga pilar tersebut merupakan langkah awal serta pijakan pemerintah Orde Baru dalam menggagas program jangka panjang pemerintah yang biasa disebut dengan Repelita (Rahmawati, 2022). Pelaksanaan Repelita dimulai dengan menasar pada pembangunan dasar di tingkat desa. Pada masa Repelita pertama hingga ketiga (1969 – 1984) tujuan utamanya adalah pertumbuhan GNP, intensifikasi pangan, dan pembangunan infrastruktur desa. Sementara itu, pada Repelita keempat hingga keenam (1984-1999) fokus pembangunan pemerintah adalah pada investasi dan infrastruktur di wilayah perkotaan (Syahrie, 2009).

Dalam usaha menyukseskan Repelita yang pertama, pemerintah mengencarkan Revolusi Hijau yang memiliki tujuan utama tercapainya swasembada pangan. Dengan bantuan konsultan asing, pakar dalam negeri, serta para penyuluh pertanian pemerintah berusaha mendekati masyarakat untuk mengenalkan teknologi baru dalam bidang pertanian (Patra, 2017). Selain itu, pemerintah juga membuat program Bimas untuk mendukung program Revolusi Hijau. Terdapat dua program utama yang digagas oleh pemerintah. Pertama adalah memberikan bimbingan kepada petani terkait teknik pertanian. Kedua adalah memberikan bantuan modal kepada para petani baik dalam bentuk kredit maupun subsidi (Suwondo Arif, 1999). Kedua program tersebut juga didukung dengan adanya Panca Usaha Tani yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa poin dari Panca Usaha Tani diantaranya adalah pemilihan bibit unggul, irigasi, pemupukan, penggunaan obat pembasmi hama, dan sistem bercocok tanam dengan pola yang baik (Patra, 2017). Hal ini tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi sistem

pertanian di Indonesia. Sistem pertanian yang mengedepankan prinsip intensifikasi dan mengabaikan prinsip ekologi, akan berdampak pada kerusakan ekosistem serta menciptakan ketergantungan kepada petani (Gultom & Harianto, 2021).

Dalam rangka pelaksanaan Repelita di wilayah Udanawu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan dalam beberapa bidang. Berdasarkan hasil analisis data, dalam bidang sosial dan ekonomi pemerintah Orde Baru melakukan sejumlah pengembangan mencakup bidang pertanian, kependudukan, dan infrastruktur. Pelaksanaan program-program tersebut akan dijabarkan secara lebih lanjut pada bagian berikut ini.

#### A. Program Pertanian di Udanawu

Depresi ekonomi serta krisis pangan yang terjadi pada tahun 70-an merupakan PR awal bagi pemerintah Orde Baru. Keadaan ini diperparah dengan gejolak politik akibat penumpasan orang-orang komunis di wilayah Blitar. Hal ini tentu berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Pasalnya kestabilan politik secara tidak langsung juga akan membawa pada kestabilan ekonomi (Utama & Dewi, 2018). Oleh karena itu, ketidakstabilan politik di Blitar juga serta merta berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Salah satu strategi pembangunan Orde Baru yang diluncurkan untuk memperbaiki ketidakstabilan ekonomi adalah meningkatkan produksi pertanian.

Dalam hal pertanian, salah satu usaha terbesar pemerintah Orde Baru adalah perbaikan Program Bimas yang telah diintrodusir oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Penyempurnaan program ini bertujuan untuk menyediakan berbagai masukan yang disubsidi kepada para petani termasuk bibit unggul, pestisida, dan pupuk (Syukur, 2010).

Pada tanggal 20 September 1976, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada empat kabupaten di wilayah Jawa Timur. Penghargaan tersebut ditujukan kepada kecamatan yang dianggap berhasil dalam menjalankan program Bimas dan KB. Kabupaten tersebut diantaranya adalah Nganjuk, Lumajang, Magetan, dan Blitar. Dalam hal ini Gubernur mengapresiasi serta mengucapkan selamat atas keberhasilan para bupati dan masyarakat atas pencapaian program yang telah ada. Selain itu, untuk mencapai ketahanan pangan nasional, gubernur Jatim meminta agar disusun pola yang tepat hingga tingkat BUUD/KUD terkait pembelian hasil panen terutama padi dari petani. Hal ini karena keterlambatan BUUD/KUD terhadap pembelian hasil panen akan mengakibatkan petani menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga dibawah standar (Berita Yudha, 1976).

Di wilayah Udanawu, pelaksanaan program Bimas dikoordinir langsung oleh pejabat desa setempat. Para pejabat desa ditugaskan untuk mendaftarkan luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat untuk pengajuan dana bantuan. Selain mendapatkan bantuan pupuk, para petani juga mendapatkan uang insentif dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah ini akan cair setiap 6 bulan sekali. Setelah satu program berakhir, para pejabat desa ditugaskan untuk mendaftarkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan Bimas lainnya (Jawari, 2023). Namun, tidak semua petani mendapatkan bantuan pupuk

dari pemerintah. Mereka mengaku mendapatkan benih dan pupuk dari hasil membeli di toko-toko terdekat (Asmirah, 2023 & Mudanun, 2023).

Meskipun begitu, wilayah Udanawu adalah salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Desa Bendorejo sebagai tempat uji coba benih di wilayah Kecamatan Udanawu. Bibit tersebut dikirim langsung dari badan riset di Bogor. Ada banyak jenis bibit pertanian yang dilakukan uji coba di desa ini. Diantara benih yang pernah dilakukan uji coba di desa ini adalah bibit padi jenis PB dan Lendah. Setelah dilakukan beberapa uji coba penanaman, penimbangan, dan peninjauan, padi yang paling berkualitas akan disumbangkan kepada masyarakat sebagai bibit unggul. Di samping itu, masyarakat juga mendapatkan bimbingan serta peninjauan dari dinas pertanian setempat. Terkait penggunaan bibit unggul, bibit padi jenis PB merupakan jenis padi yang digemari oleh masyarakat, selain karena enak padi ini memiliki umur panen yang cenderung singkat (Sarehudin, 2023). Maka tidak heran jika awal pelaksanaan Repelita, padi jenis PB merupakan padi andalan di Jawa Timur. Bahkan dengan adanya bibit padi PB, jumlah produktivitas padi di Jawa Timur meningkat menjadi dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya (Angkatan Bersenjata, 1969).

Selain menjadi tempat uji coba pupuk dan benih, desa Bendorejo adalah salah satu desa yang konsisten serta menjadi pusat koperasi yang ada di Kecamatan Udanawu. Terbukti dengan adanya lumbung padi Pertiwi, masyarakat desa Bendorejo dapat membeli aset-aset baru untuk pembangunan fasilitas umum desa. Lumbung padi Pertiwi pada dasarnya adalah lumbung swadaya yang dibangun oleh masyarakat desa Bendorejo. Pada masa Orde Baru lumbung ini dijadikan koperasi desa oleh pemerintah kabupaten. Lumbung ini bertugas menyimpan dan membeli padi dari masyarakat. Namun, karena banyak orang-orang yang memiliki lumbung sendiri di rumah, membuat masyarakat memilih menimbun padi yang dimilikinya. Akibatnya karena tidak ada yang berminat untuk menjual padi di koperasi desa, koperasi ini menjadi bangkrut dan terbengkalai (Sarehudin, 2023). Jika kita amati, sistem koperasi memanglah penting untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini karena koperasi merupakan wujud dari sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Keadaan ini selaras dengan kultur masyarakat desa sendiri yang kebanyakan mengedepankan asas kekeluargaan (Eef Saefulloh, Wasman, 2018).

Atas keberhasilan yang diraih pemerintahan Desa Bendorejo maka tidak heran jika desa ini pernah menjadi juara 2 kategori desa sedang tingkat provinsi dalam ajang lomba desa pada tahun 1970/1971 (Laporan Kemajuan Repelita I, 1974).



**Gambar 1. Lumbung Pertiwi Sebelum Alih Fungsi**

Sumber: Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974. Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Inventarisasi 316-a. Museum Brawijaya, Malang, Indonesia.



**Gambar 2. Lumbung padi Pertiwi yang sudah alih fungsi menjadi salon kecantikan**

Sumber: Dokumen pribadi peneliti

#### B. Program pengendalian penduduk di Udanawu

Penduduk merupakan salah satu komponen utama dalam proses terjadinya perubahan sosial. Banyaknya jumlah penduduk tentu memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Beberapa ahli ekonomi klasik mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut diantaranya adalah jumlah penduduk, stok barang-barang modal, luas tanah, sumber daya alam serta teknologi yang digunakan. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara tidak langsung akan menyebabkan kepadatan penduduk. Penduduk yang terlalu padat tanpa disertai pengelolaan SDM yang mumpuni akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial (Yunianto, 2021). Di samping itu, ungkapan yang biasa kita dengar “akeh anak akeh rejekine” turut menjadi penyebab meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran jika pemerintahan Orde Baru berusaha mengendalikan tingkat populasi di Indonesia.

Salah satu program yang digencarkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menekan jumlah kepadatan penduduk adalah dengan melaksanakan program Keluarga

Berencana kepada masyarakat. Program Keluarga Berencana pada dasarnya mulai digencarkan oleh pemerintah Orde Baru sejak persiapan dilaksanakannya Repelita pertama yaitu ketika dibentuknya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970, lembaga tersebut berubah nama menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk peningkatan pelaksanaan program (Puspitasari, 2015).

Wilayah Blitar adalah termasuk golongan wilayah yang sukses dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 September 1976 (Berita Yudha, 1976). Meskipun begitu, terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan KB di wilayah Blitar Barat. Masih banyak perempuan yang enggan untuk melakukan KB. Padahal para perangkat desa telah melakukan penjemputan dari rumah ke rumah. Mereka takut untuk KB dengan alasan karena mereka pekerja berat. Selain itu mereka takut karena banyak orang setelah KB yang menderita sakit (Asmirah, 2023). Bahkan, beberapa orang yang bersedia ikut KB mendapat intimidasi oleh tetangganya. Akibatnya, para perangkat desa sedikit memiliki kesulitan dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk melakukan KB. Namun para perangkat desa tersebut tidak kehabisan ide. Mereka menggunakan cara persuasif serta memberikan iming-imingi bibit kelapa gratis kepada masyarakat yang mau di KB (Jawari, 2023).

### C. Program pembangunan infrastruktur di Udanawu

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus utama pada masa Orde Baru. Pesatnya program yang digencarkan, dirasa perlu untuk membuat sarana penunjang agar program tersebut berjalan lancar. Maka dari itu, tidak heran jika sejak awal Repelita pemerintah Orde Baru berusaha melakukan pendekatan sektoral seperti penyediaan air bersih untuk pedesaan, program sanitasi, dan program pengembangan kampung (Syahrie, 2009). Hal ini juga didukung dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki rata-rata 7% menjadi modal utama pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan (Syukur, 2010).

Demi kelancaran program yang ada, dukungan dari masyarakat sangatlah perlu. Dalam hal ini melalui pejabat desa, pemerintah Orde Baru berhasil mengorganisir masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program yang ada di wilayah Udanawu. Bahkan dengan alasan ikut berjuang, masyarakat secara sukarela ikut menyukseskan program Repelita Orde Baru. Menurut Nordholt 2005) kata "Pelita" merupakan simbol modernitas dan kebaruan. Seperti layaknya lampu yang menerangi kegelapan, program ini hadir sebagai solusi dari kesulitan-kesulitan yang menimpa Indonesia. Dengan ikut menyukseskan program ini secara tidak langsung masyarakat telah mendukung kebaruan dan kemodernan.

Sebagai usaha untuk intensifikasi bidang pertanian, pada masa repelita pertama pemerintahan Orde Baru membangun sebuah sumber atau waduk penampungan air skala kecil di wilayah Manten Udanawu. Waduk tersebut menelan biaya sejumlah Rp

250.000. Waduk tersebut menjadi salah satu sumber pemasok air kebutuhan warga untuk mengairi lahan persawahan warga (Laporan Kemajuan Repelita I, 1974). Selain itu, pada masa kepemimpinan Bupati Edi Slamet (1975-1980) pemerintah juga membangun sungai sebagai sodetan dari Gunung Kelud. Selain sebagai sudetan, sungai tersebut juga digunakan sebagai sarana irigasi persawahan masyarakat. Dengan mengadakan kerja bakti pemerintah berhasil mengorganisir pejabat desa dan masyarakat untuk ikut serta melakukan pembangunan irigasi. Mereka hanya mendapatkan sebungkus nasi serta minuman sebagai upah. Bahkan pemerintah juga mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk ikut menyukseskan pembangunan. Pemerintah juga gencar membangun jalan-jalan baru sebagai akses penghubung (Sarehudin, 2023).



**Gambar 3. Beberapa Proyek Jalan Baru di Desa Bendorejo**

Sumber: Koleksi Bapak Sarehudin

### **KESIMPULAN**

Projek Desa Pancasila adalah program modernisasi Presiden Soeharto di wilayah Blitar yang bertujuan untuk membumikan nilai-nilai dalam falsafah Pancasila. Program ini menjadi anti-tesis terhadap merebaknya paham komunis di masyarakat Blitar pada awal pemerintahan Orde Baru. Pemerintah memandang bahwa nilai-nilai dalam falsafah Pancasila dirasa cocok membawa masyarakat desa ke arah yang lebih baik. Dalam praktiknya, pemerintah memberikan mandat langsung kepada seluruh koramil di wilayah Blitar untuk membuat minimal satu Desa Pancasila. Melalui kebijakan yang ada pemerintah Orde Baru berusaha membentuk desa ideal yang sesuai dengan cita-cita pemerintah Orde Baru. Dalam hal ini, pemerintah berusaha mengatur bentuk rumah, populasi, serta tingkah laku masyarakat desa. Namun, keberadaan dan istilah Desa Pancasila tampak asing di hadapan dua pejabat desa di Kecamatan Udanawu yang pernah menjabat kala itu. Saat masih mengemban jabatan, mereka sebatas tahu bahwa program dan kebijakan yang ada adalah wujud penataran P4. Meskipun begitu, pemerintah Orde Baru berhasil melakukan perbaikan dalam bidang pertanian,

pengendalian jumlah penduduk, serta membangun beberapa infrastruktur penunjang lainnya di wilayah Kecamatan Udanawu. Bahkan atas keberhasilan program di wilayah ini, Desa Bendorejo hadir sebagai salah satu desa di Kecamatan Udanawu yang mendapat penghargaan tingkat provinsi dalam ajang lomba desa pada tahun 1970/1971.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdul Syukur, et al. (2010). *Indonesia dalam arus sejarah jilid 8*. PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). PEREMPUAN MASA ORDE BARU (STUDI KEBIJAKAN PKK dan KB TAHUN 1968-1983). *VERLEDEN : Jurnal Kesejarahan*.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>.
- Eef Saefulloh, Wasman, dan D. I. N. A. (2018). *PERAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN*.
- Gultom, F., & Harianto, S. (2021). Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Hadi, D. W., & Kusuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Jurnal Sositoteknologi*. [www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4\\_jurnal\\_propaganda\\_dwiwahyohadi.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal_propaganda_dwiwahyohadi.pdf)
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah* (cet. 4). bentang budaya.
- Muhammad Donni Rizki. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: STUDI KASUS DI JAWA TIMUR PERIODE 1970an-1996* (Issue July).
- Muhammad Rifki Amirudin, Athifa Raissa Putri, Nadila Farah Dibah, Rosyidul Awwab, Slamet Sujud Purnawan Jati, Arif Subekti, G. L. (2022). *Pancasila Village : A New Order Strategy for Village Prosperity in Blitar , East Java , 1968 – 1985*. 61–69. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-63-3>.
- Nordholt, H. S. (dkk). (2005). *OUTWARD appearances: trend, identitas, dan kepentingan*. LKiS.
- Nugroho, P. S., & Afiyanto, H. (2022). Islamisasi Blitar Selatan Pasca Dekomunisme 1968-1975. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*.
- Patra, N. E. (2017). *Dampak revolusi hijau pada masa orde baru di kabupaten gunungkidul tahun 1971-1976*.

- Pristiandaru, D. L. (2023). *SDGs Desa: Pengertian, Peraturan, dan Tujuannya*. Kompas.Com.  
<https://lestari.kompas.com/read/2023/06/08/120000486/sdgs-desa--pengertian-peraturan-dan-tujuannya?page=all>
- Puspitasari, A. F. (2015). Implementasi Program Kb Di Surabaya Tahun 1974-1979. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*.
- Rahmawati, R. (2022). Repelita : Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan*.
- Sihite, R. (2003). Kekerasan Negara Terhadap Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 1 Juli.
- Suwondo Arif, S. (1999). *Pembangunan Lima Tahun Di Propinsi Jawa Timur 1969-1988*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syahrie, S. P. (2009). Politik Pembangunan Orde Baru: Industrialisasi, Swastanisasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Sejarah Lontar*.
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*. 13(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn>
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*.  
<https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>